

RUANG BANGSA DAN RUANG ALTERNATIF DALAM NOVEL “LINGKAR TANAH LINGKAR AIR” KARYA AHMAD TOHARI

Nation Spaces and Alternative Spaces in Ahmad Tohari's Novel "Lingkar Tanah Lingkar Air"

Arie Azhari Nasution^a, Ricky Yudhistira Nasution^b, dan Evi Marlina Harahap^c

^a Prodi Sastra Melayu, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 19, Padang Bulan, Medan, Indonesia.

^{b, c} Prodi Ilmu Sastra, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosiohumaniora 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia.
Pos-el: arieazhari@usu.ac.id

Naskah Diterima Tanggal 7 Januari 2021—Direvisi Akhir Tanggal 27 Maret 2022—Disetujui Tanggal 26 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi ruang bangsa dan menemukan ruang alternatif yang ditawarkan pengarang dalam novel “*Lingkar Tanah Lingkar Air*” karya Ahmad Tohari. Teori yang digunakan adalah politik ruang pascakolonial yang digagas oleh Sara Upstone (2009), khususnya pada level ruang bangsa yang memiliki struktur dasar *space*, *place*, *overwriting*, *(b)order*, *chaos*, dan *post-space*. Pemilihan masalah dan teori dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena munculnya kembali kelompok-kelompok separatis di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ruang bangsa dalam novel LTLA berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang di dalamnya terdapat *place* dan *(b)order* yang masih mewarisi konstruksi ruang kolonial. Ruang bangsa Indonesia yang demikian menuntut adanya homogenitas, kestabilan, keajegan, dan *fixed*, yang karenanya memunculkan kelompok-kelompok yang membelot pada negara. Sementara itu, ruang alternatif yang ditawarkan oleh Ahmad Tohari adalah “Pulang”, yang dapat dimobilisasi ke beberapa makna. *Pertama*, Tohari memberikan ruang alternatif untuk pulang ke Republik Indonesia dengan menerima segala *(b)order* yang telah dikonstruksi dan bersama membangun ruang bangsa tanpa memunculkan gencatan senjata sesama bangsa Indonesia. *Kedua*, ruang alternatif untuk pulang ke kampung halaman, ke ruang rumah, pulang ke orang tua, dan pulang ke diri sendiri. *Ketiga*, ruang alternatif untuk pulang ke dimensi transenden, ke Sang Pencipta, dengan jalan syahid membela negara.

Kata-kata Kunci: Sara Upstone, politik ruang, ruang bangsa, ruang alternatif, pascakolonial

Abstract

This research aims to discover the nation space construction and the alternative space that Ahmad Tohari offers in the novel “Lingkar Tanah Lingkar Air”. Theory used in this research is the politics of postcolonial space by Sara Upstone (2009), particularly at the level of nation space which has basic structure of space, place, overwriting, (b)order, chaos and post-space. The theory and problem selection in this research are related to the phenomenon of the re-emergence of separatist groups in Indonesia. In this research, the method used is qualitative descriptive. The result of the research indicates that the construction of nation space in LTLA novel have the form of Republic with a presidential system of government in which there are place and (b)order that still inherit the colonial space construction. The nation space of Indonesia demand for homogeneity, stability, constancy and fixed, consequently bring up the groups that against the State. Meanwhile, the alternative space offered by Ahmad Tohari is “coming home” which can be mobilized to several meanings. Firstly, Tohari provides an alternative space for returning to Republic of Indonesia by accepting all (b)orders that have been constructed and jointly building the nation space without rising a ceasefire among Indonesians. Secondly, an alternative space for returning to our hometown, our house, our parents and own ourselves. Finally, an alternative space for returning to a transcendent dimension and the God by choosing to be martyred by the State.

Keywords: Sara Upstone, spatial politics, nation space, alternative space, postcolonial

How to Cite: Nasution, Arie Azhari, Ricky Yudhistira Nasution, dan Evi Marlina Harahap. (2022). Ruang Bangsa dan Ruang Alternatif dalam Novel “*Lingkar Tanah Lingkar Air*” Karya Ahmad Tohari. *Aksara*. 34(2). 210—227.

PENDAHULUAN

Indonesia belakangan ini mengalami katastropi yang tidak kunjung usai. Kemunculan pandemi *Covid-19* dan korupsi dana penanganan pandemi oleh Juliari Batubara, bukan satu-satunya yang harus dihadapi. Dalam ranah politik negara, belakangan muncul kelompok separatis yang berasal dari Papua Barat. Kelompok ini menamai diri dengan *Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat* atau dengan nama lain, *the United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Tepat pada 1 Desember 2020, mereka secara sepihak mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dengan seorang eksil di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden (Ramdhani, 2020).

Fenomena ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Dr. Richard Chauvel (Ramadhan, 2020) menyatakan bahwa pada Oktober 2011, Papua juga pernah memproklamasikan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini terjadi saat kongres Rakyat Papua ke-3, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri. Lebih jauh, pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan, dan Forkorus selaku Presiden dihukum dengan alasan pemberontakan.

Melihat lebih jauh ke belakang, Indonesia juga pernah menghadapi kelompok pembelot lainnya. Secara lebih radikal, kelompok ini berkeinginan untuk mengubah dasar negara, mengganti ideologinya dengan ideologi dan sistem pemerintahan negara teokrasi. Kelompok tersebut menamai diri sebagai *Darul Islam* (juga dikenal sebagai DI/TII). Johari (2019) menyatakan bahwa pemberontakan DI/TII merupakan pembangkangan bersenjata paling panjang dalam sejarah Indonesia.

Usia pemberontakan itu berlangsung hingga 13 tahun lamanya (1949—1962).

Melalui dua contoh peristiwa di atas dengan segera dapat ditarik suatu asumsi masalah yang sangat menonjol, yang kemudian dapat dikaji lebih lanjut. Kecenderungan masalah tersebut berkenaan dengan pemerintahan Indonesia yang kerap dianggap gagal memenuhi harapan-harapan masyarakatnya. Selain itu, juga berimplikasi pada kecenderungan masalah bahwa pemerintahan melakukan tindakan pendisiplinan dengan kekerasan, menggunakan aparatus yang represif dalam pengertian Althusserian. Lebih tepatnya pendisiplinan menggunakan RSA (*Repressive State Apparatus*) yang dapat mencakup pengadilan, penjara, dan berbagai detasemen kepolisian (Althusser, 2014: 66), persis dengan kolonial. Sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang membelot terhadap negara sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Maka berdasarkan hal itu, yang menjadi inti permasalahan tampaknya terletak pada konstruksi ruang yang ada di Indonesia, yang dapat dianggap merupakan warisan dari kolonial, dari penjajah.

Hal ini dilandasi asumsi dasar bahwa kontrol atas ruang selalu berjaln kelindan dengan praktik kekuasaan, yang dengan itu akan memengaruhi identitas, keberlangsungan kuasa, kontrol terhadap kemungkinan resistensi, dan produksi diskursus baru. Philpott (2003: 56) menyatakan bahwa ruang dibentuk oleh suatu cara di mana lokasi dibayangkan atau diberi makna, dan oleh karenanya merupakan fenomena diskursif. Bahkan jauh sebelum Philpott membahas persoalan ruang, Foucault telah mensinyalir hal yang sama dengan menyatakan bahwa “*The present epoch will perhaps be above all the epoch of space*” (Foucault, 1986: 22).

Secara lebih khusus berkaitan dengan penelitian ini, pemberontakan yang

dilakukan DI/TII dapat dilacak rekam jejaknya melalui karya sastra. Faruk (2007: 213) menyatakan bahwa persentuhan masyarakat Indonesia dengan sastra modern tidak hanya melalui institusi pendidikan dan penerbit pemerintah, tetapi juga transaksi ekonomi, politik, dan kemasyarakatan antara kolonialis Belanda dengan masyarakat Indonesia yang merupakan situs-situs awal dan penting dari terjadinya persentuhan kultural tersebut. Berdasarkan pengertian yang demikian, tidak hanya terdapat kemungkinan bahwa sastra benar-benar merekam peristiwa antara kolonialis Belanda dengan masyarakat Indonesia. Tetapi juga terdapat dua kemungkinan lain: pengarang mereproduksi wacana kolonial, atau justru melakukan resistensi terhadap wacana itu.

Karya sastra yang mengangkat permasalahan DI/TII dapat ditemukan dalam novel karya Ahmad Tohari yang berjudul "*Lingkar Tanah Lingkar Air*" (LTLA). LTLA merupakan karya sastra yang mengisahkan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan hingga perjuangan untuk membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ahmad Tohari menarasikan peristiwa ini dengan memunculkan intrik-intrik politik yang lebih dominan terjadi pada masa 1949. Mulai dari anggapan bahwa terjadi pengkhianatan terhadap laskar Hizbullah (belakangan menjadi laskar DI) oleh pihak komunis sampai pada pengkhianatan oleh Republik Indonesia sendiri.

Tohari menciptakan tokoh Amid, Jun, Kiram, dan Kang Suyud untuk merepresentasikan kelompok laskar Hizbullah. Tokoh-tokoh ini sejatinya juga ikut berperan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan berhasil direbut, mereka justru mengalami polemik yang baru. Kang Suyud tidak ingin Indonesia berdiri dengan segala konstruksi ruang yang telah ada. Ia ingin Indonesia berdiri dengan landasan hukum Islam. Sementara, Amid, Jun, dan

Kiram yang awalnya tidak mengikuti Kang Suyud, pada akhirnya juga ikut terlibat untuk mengubah konstruksi ruang Indonesia. Karena dianggap membelot, tokoh-tokoh itu kemudian menjadi buronan tentara Republik. Mereka terpaksa bersembunyi di dalam hutan untuk menghindari perburuan. Hingga akhirnya ketika pimpinan tertinggi Darul Islam, Kartosuwiryo ditangkap, anggota-anggota dari organisasi itu dimaafkan dan disumpah untuk bersetia kepada Republik Indonesia. Kendati demikian, konflik yang ada tidak kunjung berhenti. Setelah DI ditaklukkan, tentara Republik harus kembali berhadapan dengan pihak Komunis.

LTLA secara umum dapat didekati dengan kajian pascakolonialisme. Menurut Ashcroft (2001) pascakolonialisme digunakan secara luas dalam berbagai cara, termasuk kajian dan analisis pendudukan teritorial oleh orang-orang Eropa, berbagai institusi kolonial Eropa, operasi imperialis, seluk beluk pembentukan subjek dalam wacana kolonial, dan perlawanan dari subjek-subjek tersebut. Dengan kata lain, pascakolonial dapat diartikan sebagai kajian yang membahas efek dan warisan kolonialisasi imperial terhadap daerah jajahannya sejak pertama kali kedatangan hingga pasca kemerdekaan. Hal ini sejalan pula dengan definisi yang diberikan oleh Loomba (1998: 12) bahwa pascakolonial diartikan sebagai perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisan-warisannya yang tetap ada hingga saat ini. Tidak jauh berbeda dengan dua definisi itu, dalam terminologi ilmu pengetahuan humaniora mutakhir, persoalan pengaruh kekuasaan politik, dan kebudayaan kolonial terhadap bangsa terjajah sampai ke masa kemerdekaan bangsa tersebut disebut persoalan pascakolonial (Faruk, 2007:5).

Pendekatan pascakolonial dalam teks menekankan efek diskursif dan material dari kolonialisme yang sekaligus memengaruhi teks-teks yang terbentuk. Penekanan itu mencoba melihat segala situasi perbedaan budaya dan kondisi-

kondisi keterpinggiran yang di jejak oleh suatu teks dan pernah tercipta dari masa-masa kolonialisme masih berlangsung (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 2003:198).

Jika LTLA secara umum dapat didekati dengan pendekatan pascakolonial, maka untuk mendeduksikan masalahnya diperlukan sebuah teori. Terutama teori pascakolonial dengan perspektif khusus terkait persoalan ruang. Apalagi studi pascakolonial, dalam konteks sastra, memang dapat mencakup masalah ruang dan tempat, selain bahasa, sejarah dsb, sebagaimana yang antara lain dinyatakan Lo dan Gilbert (1998: 5–13). Maka dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah politik ruang yang digagas oleh Sara Upstone dalam bukunya berjudul *Spatial Politics in the Postcolonial Novel* (2009).

Menurut Upstone (2009) bangsa pascakolonial adalah *space*-nya kolonial. Artinya, bagi Upstone negara bekas jajahan dianggap masih memiliki ruang-ruang kolonial yang ditinggalkan pada wilayah jajahan itu, meskipun secara fisik kolonial sudah tidak lagi berada di wilayah terjajah. Dalam hal ini, negara hanya strategi naratif untuk membuat sebuah identitas dan aparatus pemerintahan (Bhabha, 2013: 292). Oleh karenanya pula, produksi kultural pada dasarnya tetap terhubung oleh formasi dalam konteks negara-bangsa pascakolonial (A. Radcliffe, 2011: 130).

Dalam konteks karya sastra, Upstone (2009: 25) menyatakan bahwa karya-karya pascakolonial mempertanyakan atau memasalahkan penggunaan ruang bangsa sebagai penanda keterlibatannya dalam politik. Di satu pihak, ruang dapat memberikan latar belakang realistik tertentu. Di lain pihak, gambaran mengenai ruang mendapatkan makna dalam hubungannya dengan peristiwa, yaitu sebagai makna simbolik (Luxemburg & Weststeijn, 1989: 133). Ruang-ruang tersebut diklasifikasikan oleh Upstone menjadi lima bagian berdasarkan levelnya, diantaranya adalah bangsa (*nation*), perjalanan (*journey*), kota (*city*), rumah

(*home*), dan tubuh (*body*). Namun, dalam penelitian ini hanya akan menggunakan ruang dalam skala terbesar kedua, yaitu bangsa (*nation*).

Menurut Upstone (2009: 27), di dalam konstruksi ruang bangsa, terdapat keterlibatan kekuasaan kolonial sehingga di dalam ruang yang terdahulu itu pun terjadi reafirmasi terhadap hierarki dan pembagian kekuasaan kolonial. Artinya, bangsa merupakan ruang yang memiliki batas-batas yang telah terkonstruksi dan terdefinisi.

Upstone (2009: 3) membedakan ruang dan tempat untuk menunjukkan bahwa tempat tidak sepenuhnya terpisahkan dalam pembahasannya. Ruang (*space*) memiliki definisi yang luas, karena tidak sebatas fisik, tetapi juga ruang konseptual yang abstrak. Konsep ruang bukan hanya masalah menguasai daerah atau wilayah yang bersifat materi semata, tetapi juga ide atau gagasan (Upstone, 2009: 30). Sedangkan tempat (*place*) didefinisikan sebagai bentuk fisik yang menciptakan situs identifikasi (Upstone, 2009:3). Identifikasi itu dapat mengacu pada bagaimana seseorang mendefinisikan identitasnya dan/ atau bagaimana identitas itu didefinisikan oleh orang lain (Teverson & Upstone, 2011: 2). Sederhananya, tempat merupakan manifestasi dari ruang yang sudah diberi makna, yang sudah teridentifikasi. Pengertian yang demikian juga ekuivalen dengan pengertian yang dinyatakan oleh Ashcroft dkk. Bahwa tempat merupakan penyerta perbedaan, penguatan terus-menerus akan adanya pemisahan, dan bahkan menyangkut persoalan hibrida antara penjajah dan terjajah (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 1995: 391). Padahal sebelum menjadi tempat, ruang pada dasarnya bersifat cair dan terbuka yang karenanya membuka peluang terjadinya negosiasi. Keduanya bertaut karena tanpa ruang, negosiasi tempat menjadi tidak sempurna. Negosiasi atas ruang dilakukan untuk memunculkan kembali identitas masyarakat pascakolonial

yang berusaha ditutupi dengan adanya batas-batas artifisial kolonial. Hal ini yang kemudian menjadi pandangan utama Upstone terhadap politik ruang.

Secara inheren politik ruang dapat berkorelasi dengan masalah identitas, kuasa, dan resistensi (Upstone, 2009: 4). Dalam konteks Indonesia, Belanda melihat kontrol atas teritorial sebagai sesuatu yang penting untuk perluasan keuntungan, jangkauan, dan volume produksi tanah jajahan (Philpott, 2003: 59). Maka dalam hal ini, klaim terhadap apropriasi ruang yang dilakukan oleh pihak kolonial merupakan usaha untuk mendefinisikan ulang tatanan yang sebelumnya telah ada, yang telah diberi makna, yang pada gilirannya berpengaruh pada identitas, kuasa, dan resistensi yang berada pada tatanan itu sendiri.

Hal yang demikian, disebut Upstone sebagai timpa tulis (*overwriting*). Timpa tulis menunjukkan usaha penjajah untuk menyamakan perbedaan yang ada dengan memberikan definisi dan batas-batas pada ruang-ruang yang berada pada tatanan itu. Dengan kata lain, tatanan yang ada sebelumnya dihapus dan digantikan dengan yang baru, di-*chaos-kan*, dikacaukan. Dalam hal ini secara kronologi, para kolonialis mengalihkan perhatian pada masa lalu kaum terjajah untuk mendistorsi, merusak dan menghancurkan masa lalu tersebut menggunakan logika-logika manipulatif (Fanon & Philcox, 2004: 149). Hal ini juga dapat berkaitan dengan pernyataan Young, (1995: 170) bahwa kolonial menciptakan gerakan ganda; yaitu teritorial dan ruang kultural penduduk asli harus dikacaukan, dihilangkan, dan dibentuk ulang sesuai kebutuhan aparat yang menduduki kekuasaan. Gerakan ganda yang seperti itu yang pada gilirannya menciptakan sebuah konstruksi ruang bangsa dengan (*b*)*order* yang bersifat homogen, stabil, dan absolut. Selain itu, melalui hegemoni kolonial hal di atas dibuat seolah-olah bersifat alamiah, kodrati. Ditambah lagi apabila hegemoni dipahami

sebagai proses membuat, menjaga, mempertahankan dan mereproduksi makna, ideologi dan praktik yang bersifat otoritatif (Barker, 2004: 84). Dua hal di ataslah yang dalam hal ini mengimplikasikan keberadaan konstruksi ruang yang memiliki sifat-sifat keruangan kolonial, yang kemudian diadopsi oleh bangsa bekas jajahan dan sekaligus karenanya juga mengimplikasikan kehendak akan adanya sifat-sifat dalam konstruksi itu, terbelenggu olehnya.

Sifat-sifat dalam (*b*)*order* itu secara implisit mensyaratkan sebuah totalitas. Akibat syarat yang demikian, usaha untuk menghomogenkan yang dilakukan oleh penjajah sebenarnya tidak akan mungkin tercapai. Karena pada dasarnya, elemen-elemen (identitas, budaya, batas-batas ruang, dll.) yang diinklusi pada sebuah tatanan yang homogen tadi selalu bersifat heterogen. Hal ini mencerminkan bahwa tatanan kolonial yang diciptakan melalui pemetaan geopolitik (dalam istilah Said (2010) disebutnya sebagai geografi imajinatif), penamaan lokasi, dan batas-batas alamiah selalu bersifat pemaksaan.

Namun, dalam kerangka berpikir Upstone, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ruang-ruang itu sebenarnya bersifat tidak tetap, tidak stabil, cair. Upstone menggunakan poststrukturalisme dalam melihat hal ini. Post strukturalis menawarkan pandangan tentang ketidakstabilan makna, ketidakmungkinan petanda yang stabil, serta melihat jejak-jejak dari yang pernah hadir, dan mempertanyakan apa yang selalu dianggap sudah jelas (Upstone, 2009: 7). Berdasarkan kesenjangan itu, maka akan selalu terdapat residu-residu, celah-celah, ketidakstabilan yang kemudian mengimplikasikan sebuah kesempatan untuk melakukan resistensi.

Resistensi yang dilakukan oleh terjajah dapat dilakukan melalui *chaos*. Namun, gagasan mengenai kekacauan (*chaos*), tidak berarti bahwa terjajah atau masyarakat pascakolonial harus selalu melakukan kekerasan yang bersifat

destruktif. Melainkan, kekacauan juga harus dimaknai sebagai upaya melihat ulang (*revision*) konstruksi ruang kolonial dengan tujuan untuk mendestabilisasi dan mencairkan ruang itu. Dengan kata lain, keadaan *chaos* bukanlah keadaan kacau yang tidak berkesudahan melainkan sebuah destabilisasi yang menawarkan makna (Upstone, 2009: 12).

Sebenarnya, hal ini berkorelasi dengan konstruksi ruang itu sendiri yang sejatinya berisi heterogenitas namun dihomogenkan, yang karenanya secara otomatis dapat menimbulkan *chaos*. Upstone (2009: 13) menegaskan bahwa pascakolonialisme melihat ruang berisi suara-suara heterogen, yang memiliki berbagai pengalaman dan memberi penekanan pada perbedaan serta subjektivitas. Hal ini berarti bahwa penulis pascakolonial ingin mengungkapkan *chaos* yang ada dan membuka peluang untuk suatu perlawanan atau resistensi terhadap konstruksi ruang kolonial (Suciati, 2014: 5). Pengertian yang demikian, sejalan dengan Loomba (1998: 16) yang menyatakan bahwa pascakolonialisme merupakan kontestasi atas dominasi kolonial dan warisan-warisan kolonialisme.

Kemunculan *chaos* pada gilirannya juga mengimplikasikan *post-space*. Menurut Upstone (2009: 15) *post-space* merupakan konsep yang berada di luar batas-batas kolonial maupun batas-batas tradisi, bahkan melampaui dan berada sebelum batas-batas tersebut muncul. Pernyataan Upstone ini, jika ditilik secara cermat, maka akan menyatakan bahwa *post-space* bukan merupakan ruang alternatif. *Post-space* merupakan sebuah konsep yang membuka kemungkinan terjadinya pergeseran ruang dan terbentuknya ruang alternatif yang mengarah kepada aksi. *Post-space* itu berimpit dengan *chaos*. Akan tetapi bukan *chaos* itu sendiri, melainkan yang membuka kemungkinan adanya tatanan—(b)order—yang baru, semacam harapan. Sebagaimana ditegaskan oleh Upstone (2009: 23), *post-*

space bergerak melampaui konsepsi ruang yang *fixed*, menuju pemberdayaan kemungkinan yang baru.

Ruang alternatif tidak secara spesifik ditawarkan oleh Upstone sebagai penggagas teori politik ruang. Upstone hanya berhenti sampai pada titik mengenai *Post-space*, yang siap untuk dimaknai kembali, dijadikan *place*. Ruang alternatif justru terdapat pada novel-novel pascakolonial yang ditawarkan oleh pengarangnya. Dalam artian ruang alternatif yang dimungkinkan sebagai penawaran atau negosiasi yang dilakukan oleh pengarang fiksi pascakolonial dengan pemanfaatan ruang sebagai penanda keterlibatan politik di dalamnya (Upstone, 2009: 25).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian; (a) bagaimana konstruksi ruang bangsa yang terdapat dalam novel *Lingkar Tanah Lingkar Air* karya Ahmad Tohari? (b) bagaimana ruang alternatif yang ditawarkan oleh Ahmad Tohari dalam novel *Lingkar Tanah Lingkar Air*?

Walaupun narasi dalam LTLA mengindikasikan bahwa novel tersebut adalah novel pascakolonial, akan tetapi sejauh penelusuran peneliti belum ada penelitian yang membahasnya dari kacamata pascakolonial, khususnya politik ruang yang digagas Sara Upstone. Terutama atas dasar itulah penelitian ini menjadi penting untuk menambah kajian ruang Sara Upstone dan kajian terhadap karya sastra Indonesia, khususnya novel *Lingkar Tanah Lingkar Air* karya Ahmad Tohari. Kendati demikian, novel LTLA sebagai objek material pernah dikaji oleh Samsul dengan judul “*Heroisme Novel Lingkar Tanah Lingkar Air (LTLA) Karya Ahmad Tohari: Kajian Sosiologi Sastra dan Implementasinya Sebagai Salah Satu Alternatif Bahan Ajar Sastra di SMP/MTs*”. Penelitian ini menemukan bahwa Amid merupakan tokoh yang memiliki karakter berubah-ubah sikap dan pendiriannya.

Kemudian, dalam novel LTLA terdapat aspek heroisme yang meliputi: penyelamat, keberanian, keperkasaan, dsb..

Sementara itu, kajian yang menggunakan politik ruang Sara Upstone telah beberapa kali dilakukan. Di antaranya, penelitian Endang Suciati yang berjudul “*Ruang Pascakolonial dalam The God of Small Things Karya Arundhati Roy*” pada tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan pada masalah kondisi masyarakat pascakolonial India yang dualistik. Penelitian Suciati menghasilkan pentingnya keberadaan *chaos* dalam ruang yang dapat menimbulkan *post-space*, baik di dalam maupun di luar rumah. Konsep *post-space* dijadikan alat utama untuk membongkar konstruksi ruang kolonial yang ada dalam objek materialnya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dwi Rahariyoso dengan judul “*Paradoks Ruang Tubuh dalam Puisi ‘Sakramen’ Karya Joko Pinurbo: Kajian ‘Pascakolonial Tubuh’ Sara Upstone*” pada tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan masalah pada konstruksi ruang tubuh. Rahariyoso menemukan *self-dekonstruksi* tubuh dalam puisi Joko Pinurbo, yang mengimplikasikan tubuh dihancurkan dalam kefanaan, dan roh diidealkan dalam keutuhan. Hal ini menunjukkan terjadinya *chaos* pada tubuh, baik secara jasmani maupun rohani.

Penelitian ketiga yang juga menggunakan politik ruang Sara Upstone dilakukan oleh Sri Nurhidayah pada tahun 2019. Penelitian itu berjudul “*Lokalitas dan Nasionalisme: Ruang Alternatif Anti Kolonial dalam Novel The Inheritance of Loss Karya Kiran Desai*”. Penelitian ini berfokus pada masalah lokalitas dan nasionalisme pada tokoh Biju yang berada di Barat. Hasil penelitian Nurhidayah menemukan bahwa Biju merupakan sosok yang ambivalen dan selalu mendapat posisi negatif terkait identitasnya. Namun, Biju menunjukkan sikap nasionalis melalui lokalitas yang ia miliki. Kemudian, ruang alternatif yang ditemukan adalah kembali

ke Timur untuk melepaskan kekacauan hidup Biju.

Berdasarkan pemaparan di atas, belum ada penelitian yang membahas mengenai konstruksi ruang bangsa yang berposisi dengan kelompok-kelompok radikal dari bangsa itu sendiri. Khususnya kelompok Komunis dan Darul Islam, serta ruang alternatif terhadap kesenjangan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki asumsi masalah dan fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting, yang bukan saja berguna dalam menambah kajian ruang dan kajian sastra Indonesia, tetapi juga berguna untuk melihat akar permasalahan yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang membelot terhadap negara.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah teks-teks yang berupa satuan kata, tanda, frase, kalimat, baris, bait, maupun rangkaian peristiwa, dan tindakan terkait masalah penelitian yang terdapat pada novel “LTLA” karya Ahmad Tohari. Sedangkan data sekunder yang berfungsi untuk memperkaya dan mempertajam analisis adalah buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini juga dibedakan atas dua objek kajian yaitu objek formal dan material. Objek formal berkaitan dengan sudut pandang yang digunakan dalam usaha penelitian untuk memahami objek material, sedangkan objek material berkaitan dengan materi penelitian, wilayah penelitian, dan

lapangan penelitian. Adapun objek material yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel "*Lingkar Tanah Lingkar Air*" karya Ahmad Tohari yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Sementara, objek formal yang digunakan adalah politik ruang dalam ruang bangsa yang digagas oleh Sara Upstone (2009). Di dalam politisasi ruang bangsa, terdapat beberapa konsep seperti *space*, *place*, *overwriting*, *(b)order*, *chaos*, dan *post-space*. Konsepsi ini menjadi panduan dalam mengklasifikasikan data sebagai elemen yang mengkonstruksi ruang secara simbolik dan material serta ruang alternatif sebagai wujud negosiasi pengarang terhadapnya.

Kemudian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode simak adalah metode yang menyimak satuan-satuan linguistik yang signifikan yang ada di dalam teks karya sastra yang menjadi sumbernya atas dasar konsep-konsep teoritik yang digunakan (Faruk, 2014: 169). Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait masalah penelitian yang terdapat dalam LTLA. Data-data yang diperoleh dengan metode ini dapat ditambah, dikurangi, atau bahkan dibuang setelah dibandingkan dengan yang paling relevan dengan konsep-konsep teori; (1) konstruksi ruang bangsa yang terdapat dalam novel LTLA serta (2) ruang alternatif yang ditawarkan oleh Ahmad Tohari dalam novel LTLA. Sehingga, data yang dikumpulkan akan memperlihatkan seperti apa upaya dalam mengkonstruksi ruang bangsa dan relasinya terhadap ruang alternatif yang termanifestasikan dari ruang bangsa yang ada.

Lebih jauh, metode analisis data merupakan seperangkat cara atau teknik penelitian yang merupakan perpanjangan dari pikiran manusia karena fungsinya bukan untuk mengumpulkan data, melainkan untuk mencari hubungan antar data yang tidak akan pernah dinyatakan oleh data itu sendiri (Faruk, 2014: 25). Setelah data dikumpulkan dan

diklasifikasikan berdasarkan konsep teori politik ruang Upstonian, langkah selanjutnya sebagai cara untuk menganalisis data di dalam penelitian ini akan menggunakan metode dialektik, yang berlaku pada level karya sastra dengan menyelaraskan hubungan antar data pada suatu bagian dengan keseluruhan dan keseluruhan dengan suatu bagian yang dalam hal ini konsep teoritik (1) dan (2) sampai terbentuk sebuah deskripsi dengan koherensi yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Ruang Bangsa dalam LTLA

Novel *Lingkar Tanah Lingkar Air* merupakan karya sastra yang mengisahkan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari Belanda. Dalam perjalanan itu, tentara Indonesia tidak berjalan sendirian, mereka juga dibantu oleh kelompok relawan laskar Hizbullah, dan bahkan oleh kelompok komunis. Kendati demikian, setelah kemerdekaan berhasil direbut, justru peperangan dan perpecahan muncul di bangsa Indonesia sendiri. Terutama, antara militer negara dengan kelompok laskar Hizbullah yang kemudian menamai diri dengan Darul Islam (DI). Hingga pada gilirannya, setelah kelompok itu dinyatakan terlarang, bekas anggota kelompok DI diminta bergabung dengan TNI untuk menjatuhkan kelompok komunis yang juga dianggap membelot terhadap Republik Indonesia.

Kata *lingkar* pada judul novel ini, sebenarnya dapat dijadikan penanda yang menyatakan bahwa dalam ruang bangsa, dalam ruang *tanah air*, terjadi intrik politik yang kompleks, yang menimbulkan *chaos* terus menerus antara negara dengan kelompok-kelompok tertentu, *chaos* yang berangkat dari satu titik menuju ke titik itu lagi, melingkar. Hal ini sekaligus mengimplikasikan bahwa ruang bangsa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pascakolonial masih belum tercapai, belum mampu mengakomodasi heterogenitas masyarakat

bangsa itu. Bahkan ruang bangsa itu sendiri terus menerus diperebutkan untuk dapat dikonstruksi dengan cita-cita masing-masing kelompok. Perebutan yang demikian tidak mengherankan karena sederhananya istilah *nation* dapat didefinisikan sebagai “*an imagined political community*” (Anderson, 2006: 6). Meskipun demikian, perebutan tersebut juga dapat dipandang sebagai usaha untuk mencapai kemerdekaan, untuk terlepas dari pengalaman dominasi dan opresi terhadap penjajahan sebelumnya yang masih terasa pada pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Keberlangsungan dominasi dan opresi akibat warisan ruang kolonial seolah-olah memosisikan kelompok tersebut pada kemerdekaan yang semu, terutama yang dirasakan oleh kelompok laskar Hizbullah.

Dalam LTLA, laskar Hizbullah direpresentasikan oleh kelompok kecil yang terdiri dari tokoh Amid, Jalal, Jun, Kiram, dan Kang Suyud. Kemerdekaan semu yang dirasakan oleh kelompok ini, pertama kali ditunjukkan oleh Kang Suyud.

“Aku mendengar selentingan lain bahwa Kang Suyud tidak ingin setia kepada Republik karena diam-diam dia menyimpan cita-cita sendiri.” (Tohari, 2015: 71)

‘Aku’ dalam kutipan dialog tersebut adalah tokoh Amid yang sekaligus bertindak sebagai narator utama. Dialog di atas merupakan dialog yang terjadi setelah kemerdekaan direbut dari Belanda. Namun, Kang Suyud dalam hal ini, justru tidak ingin ikut melebur dalam ruang bangsa yang telah dikonstruksi menjadi negara yang berbentuk republik. Cita-cita Kang Suyud dapat dilihat pada dialog selanjutnya.

“Begini, Kiai. Ada berita dari seberang Citandui bahwa Kartosuwiryo dan kawan-kawannya bermaksud membangun sebuah negara Islam.” (.....) “Pokoknya saya mendengar berita itu. Dan saya memilih Kartosuwiryo daripada Bung Karno-Bung Hatta.” (Tohari, 2015: 74)

Cita-cita ruang bangsa serta *(b)order* yang dibayangkan oleh Kang Suyud adalah negara yang berlandaskan Islam. Dan cita-cita itu, tidak hanya diinginkan oleh Kang Suyud sendiri, melainkan juga diinginkan oleh Kartosuwiryo dan kawan-kawannya. Kelompok yang ingin mendirikan negara Islam ini, menamai diri sebagai Darul Islam dan berada di seberang Citandui sebagai *place*.

Untuk melakukan pembelaan atas cita-citanya di hadapan Kiai Ngumar, Kang Suyud memberikan alasan yang sangat spesifik. Alasan itu memiliki asumsi dasar bahwa ruang bangsa dalam pemerintahan Bung Karno-Hatta, telah dicampuri oleh segala macam orang, yang berada di luar Islam.

“Bung Karno-Bung Hatta menyusun pemerintahan bersama segala macam orang, sementara Kartosuwiryo hanya bekerja sama dengan orang Islam untuk mendirikan sebuah negara Islam.” (.....) “Namun mereka juga bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam. Sementara Kartosuwiryo tidak.” (Tohari, 2015: 75)

“*segala macam orang*” dalam kutipan dialog itu, secara metonimik atau *totem pro parte*, dapat merujuk pada kolonialis Belanda. Dengan kata lain, Kang Suyud merasa tidak rela jika pemerintahan Indonesia tetap menggunakan konstruksi ruang bangsa yang merupakan warisan dari penjajah. Maka, Kang Suyud beserta Kartosuwiryo dan kawan-kawannya ingin melakukan *overwriting* pada konstruksi ruang bangsa Indonesia yang berbentuk Republik. Hal ini dilakukan dengan menciptakan *chaos* yang berwujud pada pemberontakan, yang pada gilirannya dapat menciptakan *post-space* yang siap untuk diisi oleh *(b)order* yang berlandaskan hukum Islam sebagai tujuan akhir.

Padahal sebelum didefinisikan dan diberikan *border*, ruang bangsa yang terdapat dalam novel LTLA merupakan ruang yang cair. Upstone (2009: 6)

menyatakan apa yang telah tertulis sebelumnya berusaha dihapuskan, digantikan dengan representasi baru. Namun dalam dekonstruksi, penghapusan seperti itu selalu meninggalkan jejak. Hal ini dapat dilihat melalui dialog Kiai Ngumar yang secara implisit menyatakan bahwa terdapat jejak yang menunjukkan tidak adanya batasan antara yang Islam dan yang tidak.

“Sejak zaman dulu para ulama hidup damai dengan para santri dan juga damai di tengah orang-orang abangan. Para ulama dulu bahkan tidak pernah membuat garis pemisah antara keduanya. Memang istilah santri dan abangan, bahkan juga *wong dul-dulan*, sudah lama ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup dalam kebersamaan yang tak dapat diragukan.” (Tohari, 2015: 53)

Namun, tampaknya batasan-batasan pada ruang bangsa yang berpengaruh pada identitas telah diciptakan. Baik oleh kolonial, maupun oleh Kang Suyud sebagai masyarakat pascakolonial, yang masih terbelenggu wacana tentang batasan-batasan ruang. Dengan adanya konsep batas yang tampak sebagai sesuatu yang absolut, tak dapat digoyahkan oleh kelompok-kelompok lokal. Wilayah teritorial dengan batas-batasnya menjadi sesuatu yang harus dihargai sebagai sebuah keberadaan yang sah (*legitimate entity*) dan statusnya yang absolut menghancurkan berbagai preferensi dari masyarakat sebelumnya serta praktik-praktik kesukuan yang telah ada (Upstone, 2009: 5). Akhirnya, (*b*)*order* yang telah ada maupun yang masih ingin dikonstruksi tetap menuntut adanya homogenitas. Dalam konteks ini, hubungan antar ruang Republik Indonesia dan DI menyempit ke dalam wacana agama Islam.

Selain dialog Kang Suyud, ruang bangsa kolonial yang diwariskan pada Republik Indonesia juga dapat dilihat dari persyaratan yang diberikan pemerintah saat memberikan tawaran kepada laskar Hizbullah untuk bergabung dengan TNI.

“Terdengar selentingan, bahwa tidak semua anggota Hizbullah bisa melimpah ke dalam tentara Republik. Pelimpahan itu hanya berlaku bagi mereka yang punya ijazah minimal sekolah rakyat. Kiram dan Jun tak punya apa-apa” (Tohari, 2015: 71)

Persyaratan yang berupa keharusan untuk memiliki ijazah merupakan *border* yang diberlakukan dalam *order* ruang bangsa Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya *chaos* dalam skala kecil. Dengan kata lain, batasan tersebut mengimplikasikan munculnya orang-orang yang merasa terkucilkan, merasa inferior dan karenanya menyebabkan orang-orang itu berniat menjadi oposisi Indonesia. Kendati demikian, *chaos* ini dapat dinegosiasikan oleh Tohari melalui tokoh Kiai Ngumar. Akhirnya, Amid, Jun, dan Kiram memenuhi syarat untuk bergabung dengan tentara Republik.

Ironisnya, setelah memutuskan untuk bergabung dengan tentara Republik, Amid, Jun, dan Kiram justru mendapatkan penyerangan, sesaat sebelum mereka berangkat menghadiri pelantikan. Padahal sebelumnya mereka telah menolak ajakan Kang Suyud untuk bergabung dengan DI.

“Ketika kereta api mulai melambat, kami bersiap. Namun kami mendadak tertegun karena tiba-tiba terdengar rentetan tembakan. Naluriku berkata, ada bahaya datang. Maka aku, Kiram, dan Jun lari dan menjatuhkan diri dalam sebuah parit. Ya Tuhan, detik berikutnya aku menyadari bahwa tembakan itu diarahkan kepada kami. Aku melihat kelebat senjata berat dari salah satu gerbong kereta. Lalu, apakah arti semua ini? Pengkhianatan? Bila benar, pengkhianat mana yang bisa berbuat sekotor itu?” (Tohari, 2015: 79)

“Apalagi satu hari kemudian datang serbuan dari pasukan Republik. Ya Tuhan, kemarin aku hampir dilantik menjadi anggota pasukan resmi itu, namun sekarang aku harus menghadapinya.” (Tohari, 2015: 83)

Meski pada awalnya Amid beserta laskar Hizbullah yang lain memiliki pendapat yang berbeda mengenai siapa yang menyerang mereka, namun kutipan dialog kedua menegaskan bahwa tentara Republik yang melakukan serangan itu. Penyerangan ini merupakan bentuk *chaos* yang dilakukan untuk mempertahankan (*b*)order pada ruang bangsa, yang menuntut masyarakat Indonesia untuk tetap homogen, ajek, stabil, dan *fixed*. *Nation* yang semula diharapkan untuk menjadi pembebas manusia dari kolonialisme, justru terbukti menjadi transformasi kolonialisme itu sendiri (Upstone, 2009: 25).

Penyerangan ini sebenarnya adalah penyerangan yang salah sasaran, dilatarbelakangi oleh perpecahan laskar Hizbullah. Mereka terpecah menjadi dua kelompok. Di satu sisi terdapat kelompok yang bersedia untuk bergabung dengan tentara Republik. Sementara di sisi lain terdapat kelompok yang tidak bersedia. Pada keberangkatan menuju pelantikan, kelompok laskar Hizbullah yang tidak bersedia untuk bergabung juga berada di stasiun, sehingga serangan yang awalnya ditujukan pada laskar Hizbullah yang tidak bersedia bergabung dengan tentara, juga menyasar pada kelompok yang bersedia bergabung. Akibat *chaos* itu, kedua kelompok Hizbullah yang terpecah merasakan hal yang sama:

“Yang jelas, apa pun latar belakang penyerangan itu, di antara ratusan anak Hizbullah yang seluruhnya bersenjata lengkap meletup perasaan yang sama: *dikhianati*.¹ Aku, Jun, dan Kiram pun sama: merasa dikhianati. Dan dalam kebersamaan rasa itu berkembang sikap yang sangat cepat dan dramatis. Seluruh anak Hizbullah, baik yang pro maupun yang kontra terhadap peleburan, bersatu kembali untuk menghadapi lawan baru: siapa lagi kalau bukan mereka yang menyerang kami dari dalam gerbong

kereta itu, serta kekuatan yang berada di belakangnya.” (Tohari, 2015: 81)

Ketika seluruh anggota laskar Hizbullah merasa dikhianati, mereka segera menarik diri ke Somalangu (*Place*). Di sana, mereka membentuk kelompok baru yang pada akhirnya bergabung dengan DI dengan menamai diri sebagai Angkatan Oemat Islam (AOI). Kelompok ini dibentuk untuk melawan lawan baru mereka.

Selain hal itu, kutipan dialog di atas juga menunjukkan bahwa *chaos* yang terjadi tidak hanya berelasi dengan dua pihak, antara Republik dan Hizbullah saja. Akan tetapi relasi *chaos* itu meluas, melibatkan pihak lain, pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat melalui kalimat “*kekuatan yang berada di belakangnya*”. Berdasarkan kutipan itu pula, terdapat hubungan antar data yang harus dihubungkan satu sama lain. Dalam hal ini, tentara Republik sebenarnya telah disusupi oleh pihak komunis.

“Malah saya tahu dengan jelas, beberapa anak buah Siswo Wuyung ada dalam barisan tentara Republik. Jangan lupa Siswo Wuyung adalah pendiri persatuan komunis di wilayah ini sejak 1938.” (Tohari, 2015: 48)

Kutipan di atas merupakan dialog yang diucapkan oleh Kang Suyud, yang menegaskan bahwa terdapat kelompok komunis di dalam tentara Republik. Jika penyerangan dilakukan oleh tentara Republik yang telah disusupi komunis, maka akan terlihat bahwa sebenarnya pihak komunis juga ingin mempertahankan (*b*)order antara mereka dan Hizbullah. Kelompok komunis itu tidak menginginkan laskar Hizbullah untuk bergabung dengan tentara Republik. Dengan demikian, laskar Hizbullah memiliki dua lawan sekaligus, tentara Republik dan kelompok Komunis.

¹ Garis miring pada kata ‘dikhianati’ sesuai dengan yang dituliskan Tohari pada novel LTLA.

Setelah penyerangan itu, Amid, Kiram, dan Jun beserta anggota laskar Hizbullah lainnya, masih sempat melakukan balas dendam terhadap pihak yang menyerang mereka. Namun, karena mereka kalah dalam jumlah dan peralatan, akhirnya Amid, Jun, dan Kiram memilih kembali ke kampung. Akan tetapi, Kiram dan Jun merasa tidak puas dan masih menyimpan dendam. Sehingga kedua tokoh tersebut bergabung dengan Kang Suyud yang bernaung di bawah DI. Sementara itu, Amid setelah menemui Kiai Ngumar justru memutuskan untuk menjadi masyarakat biasa dengan harapan terbebas dari kekacauan.

Kendati demikian, harapan Amid sekali lagi berakhir dengan cara yang ironis. Amid telah ditetapkan sebagai seorang buronan oleh tentara Republik. Identitas Amid sebagai seorang buronan sebenarnya merupakan akibat dari keinginan pemerintah untuk menjaga kekuasaannya dan menjaga ruang bangsa tetap pada konstruksinya. Amid dikejar sampai ke kampung halamannya, bahkan dalam hal ini Kiai Ngumar ditahan oleh tentara karena dianggap menyembunyikan Amid. Sehingga, untuk menyelamatkan diri Amid harus bergabung dengan DI bersama Kang Suyud, Jun, dan Kiram.

Setelah bergabung dengan DI, mereka bersembunyi di sebuah gua batu kapur di dalam hutan Jati Cigobang (*place*). Namun, persembunyian mereka pada gilirannya juga menjadi tidak aman.

“Ada operasi massal. Aparat keamanan, dengan mengerahkan ratusan penduduk kampung, menyisir hutan jati Cigobang untuk menangkap kami. Beruntung Jun, yang sedang berburu balam, melihat gelagat mereka dan lari memberitahu kami.” (Tohari, 2015: 130)

Chaos tetap terjadi meski mereka telah bersembunyi. Bahkan, kali ini *chaos* itu tidak hanya melibatkan tentara Republik saja. Relasi *chaos* ini meluas pada ruang-ruang yang lain. Ruang masyarakat sipil,

penduduk kampung. Kendati demikian, Amid, Jun, dan Kiram masih dapat selamat.

Di dalam hutan Jati itu, selain gua persembunyian, terdapat pula rumah ilalang milik keluarga pembuat balok jati. Tepatnya, keluarga pencuri kayu jati.

“Hunian itu adalah kelompok lima rumah beratap ilalang yang berdiri pada dataran sempit yang dikelilingi tebing-tebing. Penghuni di sana adalah lima keluarga pembuat balok jati. Mereka menjual barang curian itu kepada penduduk desa di sekitar hutan.” (Tohari, 2015: 10)

Kata “curian” pada dialog di atas, mengimplikasikan bahwa keluarga yang tinggal di hutan itu telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Maka dalam hal ini, relasi makna tersebut dapat merujuk pada konstruksi ruang bangsa republik Indonesia. Dengan kata lain, hutan jati yang awalnya merupakan sebuah ruang yang cair, telah diberi makna menjadi *place* dan diberikan *border*, yang karenanya segala yang ada di dalam *place* itu merupakan milik pemerintah. Warisan konstruksi ruang kolonial, juga ditegaskan melalui kutipan dialog di atas. Hal itu dapat dilihat melalui kata “desa”. Desa merupakan *place* dan sekaligus *border* yang diciptakan pihak kolonial untuk membedakannya dengan kota. Konsep ruang berbatas ditanamkan pada masyarakat sebagai sesuatu yang tetap, terkontrol, absolut, dan alami. Faktanya, kondisi tersebut merupakan bentukan yang terkaburkan bersama dengan meresapnya konsep kolonial tersebut (Upstone, 2009: 4).

Ruang bangsa yang dinarasikan Tohari dalam novel LTLA mengalami *chaos* yang terus melingkar, *chaos* yang terjadi secara terus menerus antara pemerintahan negara dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam ruang tersebut. Selain yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula *chaos* yang terjadi antara pihak TNI dibantu oleh Amid, Jun, dan

Kiram² dengan pihak komunis yang belum berhasil dibersihkan secara intensif setelah peristiwa makar di Madiun (*place*) pada tahun 1948. Kelompok komunis yang tersisa ini disebut oleh Tohari sebagai Gerakan Siluman (GS).

“Dan puncak kekisruhan terjadi pada tahun 1965, ketika aku mendengar berita yang simpang siur bahwa ada makar di Jakarta. Beberapa jenderal Angkatan Darat terbunuh. Berita itu terus berkembang. Akhirnya radio memberitakan bahwa yang berada di belakang gerakan itu adalah orang-orang komunis. Bahkan kemudian tersiar berita yang pasti bahwa pelaku makar memang orang-orang komunis.” (Tohari, 2015: 156)

“Maka terlihat pemandangan yang tak lazim: surau Kiai Ngumar didatangi oleh mereka yang dikenal komunis dan kini rajin berkain sarung. Namun tak lama. Mereka tak muncul lagi di surau Kiai Ngumar setelah mereka ditangkap dan dibawa pergi entah ke mana. Ada yang bilang, mayat mereka kemudian bertebaran di kali, di pinggir hutan, dan di rawa-rawa.” (Tohari, 2015: 157)

Kutipan pertama menunjukkan *chaos* antara Republik Indonesia dengan pihak komunis yang terjadi di Jakarta (*place*), yang kemudian menewaskan beberapa Jenderal. Kata “jenderal” dan “angkatan darat” juga menunjukkan di dalam ruang bangsa terdapat kedudukan struktural militer. Sementara, kutipan kedua menunjukkan perlakuan opresi yang dilakukan pemerintahan dalam upaya mempertahankan ruang bangsa yang ada. Berdasarkan hal itu, sikap pemerintah dalam menghadapi DI maupun komunis menunjukkan sebuah kesamaan dengan penjajah. Persamaannya terletak pada sifat-sifat kolonialisme seperti eksploitasi, perbudakan, sikap semena-mena, dan

kebohongan yang dilakukan untuk menjaga kelanggengan rezim (Upstone, 2009: 28). Melalui kutipan dialog di atas, indikasi sikap semena-mena dapat dilihat melalui kalimat “*mayat mereka kemudian bertebaran di kali, di pinggir hutan, dan di rawa-rawa*”. Kata “mayat” menunjukkan bahwa terdapat orang-orang yang diakhiri hidupnya. Sementara, kata “bertebaran” menunjukkan bahwa mayat itu dibiarkan begitu saja, dianggap tidak berharga dibandingkan dengan kelanggengan rezim, kelanggengan ruang bangsa dan (*b*)order di dalamnya.

Namun, untuk tidak berpihak kemana pun, sebenarnya dari pihak komunis juga melakukan hal yang sama. Berdasarkan kutipan di atas, mereka juga mengambil nyawa para Jenderal dengan semena-mena. Maka, dapat dikatakan bahwa kedua pihak, baik Republik Indonesia melalui militer maupun pihak Komunis, ikut melanggengkan cara-cara kolonial dalam upaya perebutan ruang bangsa. Terbelenggu dengan sikap-sikap kolonial dan wacana-wacananya.

Ruang Alternatif dalam Novel LTLA.

Dalam LTLA, narasi ruang alternatif yang ditawarkan oleh Tohari telah beberapa kali muncul. Namun, kemunculan ruang alternatif itu tidak sepenuhnya berhasil diterima oleh tokoh-tokoh di dalam novel LTLA. Ruang alternatif dalam LTLA, terutama dapat dilihat melalui dua tokoh, diantaranya adalah Kiai Ngumar dan Amid. Melalui Kiai Ngumar, secara implisit, ruang alternatif telah diberikan sejak Indonesia baru mendapatkan kemerdekaannya.

“Kalau tak salah, terhadap pertanyaan ini pun aku dulu sudah memberikan jalan keluar. Kalian meletakkan senjata dan kembali ke tengah masyarakat, atau kalian bergabung dengan tentara resmi pemerintah. Sebetulnya kalian memilih yang mana?” (Tohari, 2015: 72)

² Bantuan ini adalah manifestasi dari ruang alternatif yang tercipta. Dan akan dipaparkan pada bagian selanjutnya, pada subjudul 2.2. yang membahas

tentang ruang alternatif yang ditawarkan Ahmad Tohari.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Kiai Ngumar telah menyarankan untuk menjadi masyarakat biasa, atau menjadi bagian pemerintahan, setelah penjajah pergi sebagai ruang alternatif. Kiai Ngumar dalam hal ini. Sejalan dengan pendapat (Upstone, 2009: 27) bahwa hingga sekarang sebenarnya masih banyak yang melakukan pembelaan terhadap ruang bangsa. Hal tersebut terutama disebabkan oleh asumsi bahwa di dalam sejarah perlawanan terhadap ruang kolonial, ruang bangsa juga memegang peranan yang penting dalam memunculkan wacana antikolonial. Saran dan pembelaan terhadap ruang bangsa yang diberikan Kiai Ngumar dilandasi oleh satu alasan kuat yang dimilikinya.

“Sabarlah, Suyud. Aku ingin kembali mengingatkanmu akan kandungan Kitab. Di sana disebutkan, hanya ada satu kekuasaan yang sah dalam satu negara. Dengan kata lain, bila Republik sudah diakui sebagai kekuasaan yang sah, lainnya otomatis menjadi tidak sah.” (Tohari, 2015: 75)

Kiai Ngumar telah mensinyalir bahwa kekuasaan yang akan muncul belakangan setelah berdirinya Republik merupakan kekuasaan yang tidak sah. Kutipan dialog di atas terjadi saat Indonesia baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Dalam hal ini, kemerdekaan yang baru saja didapatkan Indonesia dapat disebut sebagai *post-space* atau ruang yang membuka kemungkinan harapan yang baru. Upstone mengatakan bahwa *post-space* adalah gerakan menuju ruang alternatif untuk mempertimbangkan ruang pascakolonial dalam konteks nasional (Upstone, 2009: 25).

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia sebagai *post-space*, sebenarnya dapat membuka ruang alternatif yang dapat dimaknai sebagai kemungkinan untuk bergabung dengan pemerintahan, bergabung dengan Republik Indonesia sebagai upaya negosiasi. Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (subjudul 2.1), ruang alternatif

ini akhirnya kembali mengalami *chaos*, yang karenanya bukan merupakan ruang alternatif. Hal ini disebabkan ruang itu tidak memungkinkan adanya penawaran, adanya negosiasi.

Kemungkinan adanya ruang alternatif kedua dimunculkan melalui pergeseran kondisi yang dialami oleh tokoh Amid. Tepatnya, kondisi kemenduaan tubuh tokoh Amid, kondisi yang *chaotic*. Upstone (2009: 170) berpandangan bahwa tubuh tidak dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa menerima, tapi justru pemilik penuh atas dirinya sendiri yang dapat memicu perubahan dirinya dan pihak lainnya. Sepanjang narasi yang ada di novel LTLA, Amid digambarkan sebagai tokoh yang selalu melamun.

“Masih melamun tentang zaman kuno, Mid?” Aku tersenyum. Sulit rasanya mengembalikan pikiran ke alam nyata. Kuhirup kopi dingin dari cangkir logam.” (Tohari, 2015: 77)

Kata “masih” dalam kutipan dialog di atas, menunjukkan bahwa Amid kerap kali melamun, tidak hanya sekali. Kesulitan Amid untuk membawa kembali pikirannya ke alam nyata dilatarbelakangi oleh kemenduaan Amid sendiri. Amid mengalami kemenduaan karena ia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh laskar DI dan apa yang dilakukan oleh tentara Republik adalah tindakan yang salah. Di satu sisi, pemberontakan yang dilakukan pihak DI menuntut adanya korban. Di sisi yang lain, upaya pemerintah untuk mempertahankan ruang bangsa melalui tentara juga menuntut adanya korban dan korban-korban itu sama-sama orang Indonesia yang sama-sama berhak menikmati kemerdekaan. Kemenduaan Amid pertama kali didapatkannya ketika membunuh seorang tentara Republik.

“Dan mayat pemiliknya, tak peduli ia seorang militer Republik, tergeletak di depan mataku karena peluru yang kutembakkan. Aku merasakan adanya

dua kekuatan tarik-menarik, suatu pertentangan yang mulai mengembang dalam hatiku. Seorang lelaki, militer yang baru kubunuh itu, agaknya ingin selalu merasa dekat dengan Tuhan. Dan ia telah kuhabisi nyawanya. Sementara itu aku harus percaya bahwa Tuhan yang selalu ingin diingatnya melalui tasbih dan Quran-nya itu pastilah Tuhanku juga, yakni Tuhan kepada siapa gerakan Darul Islam ini mengatasnamakan khidmahnya. Hatiku terasa terbelah oleh ironi yang terasa sulit kumengerti.” (Tohari, 2015: 19)

Amid yang dahulu adalah seorang seorang santri merasa memiliki kesamaan dengan tentara Republik itu. Bukan hanya saja sama-sama orang Indonesia dan berhak menikmati kemerdekaan, akan tetapi juga sama-sama memiliki kepercayaan akan Tuhan, yang menurut Amid sendiri adalah Tuhan yang sama. Dalam hal ini, kemenduaan yang dialami Amid semakin terasa ketika keluarga penghuni rumah ilalang dan Kang Suyud meninggal akibat serbuan dari tentara Republik.

“Demi Tuhan, sesungguhnya aku sudah terbiasa melihat mayat-mayat dengan luka tembakan, baik dari kalangan lawan maupun kawan. Aku sudah sering menyaksikan tubuh yang hancur atau tengkorak yang pecah oleh gempuran mata peluru. Bahkan aku pernah melaksanakan perintah eksekusi atas dua teman sendiri: satu karena kesalahan menggelapkan barang rampasan dan satu lagi karena kesalahan melakukan birahi sejenis. Rasanya, semua itu tak begitu mengerikan. Ya, semua itu tidak terasa begitu menggerus jiwa bila dibandingkan dengan kepiluan yang kurasakan ketika aku menatap mayat para pencuri kayu bersama istri dan anak-anak mereka.” (Tohari, 2015: 11)

“Kang Suyud adalah orang tua yang kami hormati. Bahkan dalam kelompok kami, Kang Suyud akan menjadi seorang martir tanpa keraguan. Maka mungkin hanya aku seorang yang diam-diam menganggap kematian Kang Suyud sebagai kesia-siaan. Juga, diam-diam aku

mulai meragukan hal kemartiran atas kematian orang-orang dari gerakan kami, termasuk Kang Suyud.” (Tohari, 2015: 13)

Sekali lagi Amid merasa bahwa perbuatan tentara Republik maupun kelompoknya adalah tindakan yang salah. Akibat perseteruan mereka, orang-orang yang lemah, yang tidak bersalah, khususnya keluarga penghuni rumah ilalang juga ikut menanggung akibatnya. Hal ini dipertegas pada kutipan dialog selanjutnya.

“jiwaku amat terpukul ketika melihat kelima keluarga pembuat balok itu musnah bersama hunian mereka. Terasa ada tagihan yang mengepung jiwaku: adilkah melibatkan, meskipun tak sengaja, orang-orang lemah itu ke dalam gerakan kami sehingga mereka harus ikut menanggung akibat yang tak terperikan? Aku sendiri bisa menjawab dengan mudah: *Tidak*. Dan kematian mereka yang sangat mengerikan itu justru menjadi bukti ketidakadilan itu.” (Tohari, 2015: 12)

Sebagaimana dikatakan Upstone (2009: 12) bahwa tersingkapnya kembali kondisi *chaos* dapat dimanfaatkan untuk melakukan imajinasi ulang atas ruang. Dengan kata lain, *chaos* dapat mengimplikasikan kehadiran *post-space*. Dalam hal ini, *chaos* dalam skala kecil yang terjadi pada individu muncul dari tokoh Amid. Sementara *chaos* dalam skala besar terjadi antara Republik dengan DI. Kedua *chaos* ini, juga memunculkan dua *post-space*. Dalam skala kecil, *post-space* itu berbentuk harapan Amid untuk mendapatkan kesempatan kembali bergabung dengan Republik. Dalam skala besar, *post-space* hadir ketika Republik berhasil mengakhiri *chaos* yang ada dengan menangkap pimpinan tertinggi Darul Islam, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang juga memunculkan harapan baru. Akhirnya, kedua *post-space* ini mengalami relasi satu sama lain. Relasi itu menyempit pada ruang alternatif ‘pulang’.

“Dalam ketidakpastian tentang sikap para tetangga nanti, aku masih merasakan kesejukan yang dipesankan oleh sepatah kata: “pulang”. Ya, aku dalam perjalanan pulang. Pulang ke rumah, pulang kepada orangtua, dan pulang untuk diri yang harus kucari kembali. Aku sadar, perjalanan ini mungkin tak mudah, namun aku akan meneruskannya sampai ke tujuan.” (Tohari, 2015: 152)

“Maka sejak hari pertama aku kembali, aku sudah yakin bahwa jalan pulang sudah lapang, pulang dalam makna yang paling dalam.” (Tohari, 2015: 153)

Ruang alternatif ini, oleh Tohari direlasikannya melalui kebijakan Republik Indonesia. Kebijakan yang berisi seruan agar semua anggota DI/TII meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat keamanan dengan jaminan pengampunan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Saat pertama mendengar berita ini, aku terkejut. Ah, tetapi aku juga lega. Satu hal yang sudah bertahun-tahun menindih jiwaku, ketidakpastian yang amat menggelisahkan, tiba-tiba lenyap. Ada rasa lapang yang lambat laun mengembang dengan pasti dalam jiwaku. Ada benih harapan yang tiba-tiba muncul untuk berkumpul dengan istri dan anakku. Segera terbayang, aku menjadi warga kampung, bertani, dan hidup tenang. Ya, tenang. Aku bukan lagi *wong alasan*, manusia rimba, yang diburu-buru. Aku bukan lagi *wong alasan* yang terpisah dan tersingkir dan disingkir oleh masyarakat. Aku akan kembali seperti dulu, menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan bersama.” (Tohari, 2015: 114)

Setelah berita kebijakan itu sampai pada mereka, Amid, Jun, dan Kiram, akhirnya memutuskan untuk mengambil ruang alternatif ‘pulang’. Bahkan pada gilirannya, setelah mereka memilih untuk pulang, Amid, Jun, dan Kiram, memutuskan untuk membantu tentara Republik dalam upaya menumbangkan pihak Komunis.

“Ya, sekarang aku berada dalam sebuah perjalanan menuju pertempuran yang lain, sangat lain. Kini aku akan berperang atas nama Republik, sesuatu yang pernah sangat kurindukan dan gagal terlaksana. Tetapi kini semuanya akan menjadi kenyataan, dan aku bersama Kiram dan Jun, meski hanya sementara, menjadi bagian tentara Republik.” (Tohari, 2015: 162)

Kendati demikian, ruang alternatif pulang yang ditawarkan Tohari dapat dimobilisasi ke beberapa makna. Tidak hanya pulang ke Republik Indonesia. Berdasarkan dua kutipan sebelumnya di atas, ruang alternatif pulang, juga dapat dimaknai kembali ke kampung halaman, ke ruang rumah, pulang ke orang tua, dan pulang ke diri sendiri. Bahkan di bagian akhir novel LTLA, Tohari menarasikan arti pulang yang berbeda.

Pada saat Amir, Jun, dan Kiram membantu tentara Republik menumpas komunis, Tohari menawarkan untuk pulang ke dunia transenden, dunia jauh di sana, pulang kepada Sang Pencipta, Tuhan.

“Aku masih bisa menangkap suara Kiai Ngumar yang baru saja diucapkannya. Aku juga masih ingat wejangan yang dulu pernah diberikannya kepadaku: yaitu memerangi kekuatan yang merusak ketenteraman masyarakat hukumnya wajib. “Tetaplah tawakal, Mid. Engkau menjelang syahid.” “*Laa ilaaha illallaah...*” “*La-ilah-illallah...*” “*Laa ilaaha illallaah...*” “*...illa... allah...*” “*Laa ilaaha illallaah....*” (Tohari, 2015: 165)

Tokoh utama Amid meninggal setelah tertembak pihak komunis, pihak yang berkhianat kepada negara. Maka berdasarkan hal itu, selain makna pulang yang telah disebutkan di atas, Tohari juga menawarkan ruang alternatif pulang dengan makna: pulang kepada Tuhan melalui jalan syahid membela negara.

SIMPULAN

Ruang bangsa Indonesia sebagai negara pascakolonial dalam novel LTLA digambarkan oleh Tohari sebagai ruang bangsa yang berbentuk Republik, memiliki struktur militer, dengan sistem pemerintahan presidensial, yang di dalamnya terdapat beberapa *place* dan (*b*)*order* yang masih mewarisi konstruksi ruang kolonial. Ruang bangsa Indonesia menuntut adanya homogenitas, ketetapan, kestabilan, keajegan, dan *fixed*. Sehingga pada gilirannya menyebabkan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh DI dan Komunis. Ruang bangsa yang mengimplikasikan *chaos* yang terus melingkar juga menunjukkan bahwa Ahmad Tohari selalu berupaya membongkar konstruksi yang dibangun, termasuk konstruksi pascakolonial sendiri, hingga akhirnya berhenti ketika DI dan Komunis ditaklukkan oleh tentara Republik.

Sementara itu, ruang alternatif yang ditawarkan oleh Tohari tidak sepenuhnya melakukan resistensi terhadap ruang bangsa Indonesia yang merupakan warisan kolonial dan tidak pula sepenuhnya terjebak dalam wacana kolonial. Tohari justru memberikan ruang alternatif untuk membangun bersama ruang bangsa tanpa menyebabkan perseteruan dan konflik. Ruang alternatif yang ditawarkan Tohari direpresentasikan oleh tokoh Kiai Ngumar serta tokoh Amid yang mengalami kemenduan yang berujung pada ruang alternatif “Pulang”.

Ruang alternatif ini bersifat metaforis, yang dapat dimobilisasi ke beberapa makna. Sebagaimana diungkapkan Upstone (2009: 11) bahwa dalam pandangan pascakolonial, ruang lebih bersifat cair, berbeda dengan harmonisasi dan idealisasi ala kolonial. Makna *pertama*, Tohari memberikan ruang alternatif untuk pulang ke Republik Indonesia dengan menerima segala (*b*)*order* yang telah dikonstruksi. *Kedua*, ruang alternatif untuk pulang ke kampung

halaman, ke ruang rumah, pulang ke orang tua, dan pulang ke diri sendiri. *Ketiga*, ruang alternatif untuk pulang ke dimensi transenden, ke Sang Pencipta, dengan jalan syahid membela negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Radcliffe, S. (2011). Third space, abstract space and coloniality: National and subaltern cartography in Ecuador. Dalam A. Teverson & S. Upstone (Ed.), *Postcolonial Spaces; The politics of place in contemporary culture*. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230342514_10
- Althusser, L. (2014). *On the reproduction of capitalism: Ideology and ideological state apparatuses*. (Goshgarian, Penerj.). London: Verso.
- Anderson, B. R. O. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. (Rev. ed). London; New York: Verso.
- Ashcroft, B. (2001). *Postcolonial Transformation*. London & New York: Routledge & Francis Group.
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (Ed.). (1995). Introduction. Dalam *The Post-Colonial Studies Reader* (Vol. 70, hlm. 483). London: Routledge. <https://doi.org/10.1093/oso/-9780195075977.003.0004>
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2003). *Menelanjangi kuasa bahasa: Teori dan praktik sastra poskolonial*. Yogyakarta: Qalam.
- Barker, C. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781446221280>
- Bhabha, H. K. (2013). *Nation and Narration*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/-9780203388341>
- Fanon, F., & Philcox, R. (2004). *The wretched of the earth: Frantz Fanon*; translated from the French by Richard Philcox; introductions by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha. New York: Grove Press.
- Faruk. (2014). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruk, F. (2007). *Belenggu Pasca-kolonial: Hegemoni & Resistensi dalam Sastra Indonesia* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1986). *Of Other Spaces*. (J. Miskowiec, Penerj.). *Diacritics*, Spring, 16(1), 22–27. <https://doi.org/10.4324/9780429399671-24>
- Johari, H. (2019, November 16). *Janji Seorang Komandan DI/TII*. Diambil 14 Desember 2022, dari Historia—Majalah Sejarah Populer

- Pertama di Indonesia website: <https://historia.id/histeria/articles/janji-seorang-komandan-di-tii-P1R1W>
- Lo, J., & Helen, G. (1998). *Postcolonial Theory: Possibilities and Limitations*. Sydney: The Rex Cramphorn Studies Centre for Performance Studies.
- Loomba, A. (1998). *Colonialism/ Postcolonialism*. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Luxemburg, J. V., & Weststeijn, W. G. (1989). *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Philpott, S. (2003). *Meruntuhkan Indonesia Politik Postkolonial dan Otoritarianisme* (Q. Zuly & Uzair. F., Ed.; Nuruddin. M.A., Penerj.). Yogyakarta: LKiS.
- Ramadhan, A. S. (2020). *Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Angkat Benny Wenda Jadi Presiden*—Suarajabar.id. Diambil 14 Desember 2022, dari <https://jabar.suara.com/read/2020/12/02/100822/deklarasikan-kemerdekaan-papua-barat-angkat-benny-wenda-jadi-presiden>.
- Ramdhani, J. (2020). *ULMWP Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua, TNI: Tak Ada Pengaruhnya*. Diambil 14 Desember 2022, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-5278632/ulmwp-deklarasi-pemerintahan-sementara-papua-tni-tak-ada-pengaruhnya>
- Said, E. W. (2010). *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek* (S. Z. Qudsy, Ed.; A. Fawaid, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suciati, E. (2014). *Ruang Pascakolonial dalam The God of Small Things Karya Arundhati Roy*. Poetika, 1(1). <https://doi.org/10.22146/-poetika.v2i1.10401>
- Teverson, A., & Upstone, S. (2011). Introduction. *Dalam Postcolonial Spaces; The politics of place in contemporary culture*. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/-9780230342514>
- Tohari, A. (2015). *Lingkar Tanah Lingkar Air*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Upstone, S. (2009). *Spatial politics in the postcolonial novel*. England: Ashgate Publishing Company.
- Young, R. J. C. (1995). *Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race*. London: Routledge.